

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi terhadap manajemen sektor publik yang dilakukan sebagai salah satu gerakan yang timbul akibat desakan kritik masyarakat terhadap buruknya manajemen sektor publik menciptakan konsep baru yang saat ini dikenal dengan istilah *New Public Management*. *New Public Management* yakni sebuah konsep yang membantu dalam meningkatkan kinerja manajemen di sektor publik. Menurut Mardiasmo (2018:20) upaya peningkatan kinerja di instansi publik melalui NPM dibutuhkan penerapan beberapa metode pengelolaan organisasi yang diterapkan di instansi swasta ke instansi publik.

Pandangan mengenai *New Public Management* menghendaki bahwa penggunaan informasi dan teknologi komunikasi akan meningkatkan efisiensi, kebijakan yang efektif, dan nilai-nilai demokrasi (OECD, 2016). Perkembangan teknologi informasi yang pesat menciptakan kemudahan akses informasi oleh setiap orang tidak terkecuali kebutuhan akses informasi milik sektor publik. Keterbukaan informasi sektor publik menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Di Indonesia, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik dibuktikan dengan turut sertanya Indonesia menjadi salah satu pencetus berdirinya *Open Government Partnership* (OGP). Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan delapan negara lain menandatangani Deklarasi OGP pada September 2011 (OECD, 2016). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menggiatkan praktik keterbukaan pemerintah dengan

membuat kebijakan yang transparan dan melibatkan peran aktif warga negara.

*Open Government* menurut OECD merupakan sebuah transparansi atas kegiatan pemerintah, keterbukaan akses terhadap pelayanan dan informasi, responsif pemerintah atas munculnya inovasi. Kebijakan *Open Government* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam kebijakan *Open Government* meliputi keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas (OECD, 2016). Dengan berlakunya prinsip-prinsip tersebut, maka akan dihasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan menambah tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

*Open Government* di Indonesia didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah diharuskan untuk membentuk kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditugaskan untuk menyimpan, mencatat, dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik. Keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu pendukung akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi kepada publik menjadi media komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Adanya informasi yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat berkesempatan untuk ikut serta membentuk kebijakan agar lebih sesuai dengan kepentingan bersama.

Selaku pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melakukan pengamatan dan penilaian mengenai keterbukaan informasi milik badan publik. Menurut Surat

Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021, hasil dari pengamatan dan penilaian terhadap keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021**

No	Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Perguruan Tinggi Negeri	21 Badan Publik (24,71%)	15 Badan Publik (17,65%)	13 Badan Publik (15,29%)	12 Badan Publik (14,12%)	24 Badan Publik (28,24%)
2	BUMN	6 Badan Publik (5,94%)	15 Badan Publik (14,85%)	17 Badan Publik (16,83%)	16 Badan Publik (15,84%)	47 Badan Publik (46,53%)
3	Lembaga Non Struktural	2 Badan Publik (6,06%)	7 Badan Publik (21,21%)	5 Badan Publik (15,15%)	3 Badan Publik (9,09%)	16 Badan Publik (48,48%)
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	16 Badan Publik (39,02%)	6 Badan Publik (14,63%)	4 Badan Publik (9,76%)	6 Badan Publik (14,63%)	9 Badan Publik (21,95%)
5	Pemerintah Provinsi	10 Badan Publik (29,41%)	11 Badan Publik (32,35%)	10 Badan Publik (29,41%)	0 Badan Publik (0%)	3 Badan Publik (8,82%)
6	Kementerian	24 Badan Publik (70,59%)	7 Badan Publik (20,59%)	2 Badan Publik (5,88%)	0 Badan Publik (0%)	1 Badan Publik (2,94%)
7	Partai Politik	4 Badan Publik (44,44%)	2 Badan Publik (22,22%)	3 Badan Publik (33,33%)	0 Badan Publik (0%)	0 Badan Publik (0%)

Sumber: Komisi Informasi Pusat (2021)

Berdasarkan tabel 1.1, keterbukaan informasi milik 100 Badan Publik masih tergolong tidak informatif. Perbedaan tingkat implementasi keterbukaan informasi publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan Muñoz dkk. (2022) dalam penelitiannya, terdapat berbagai faktor yang mendorong inisiatif pemerintah daerah Spanyol dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Faktor-faktor tersebut adalah kepadatan penduduk, kekayaan daerah, tekanan fiskal, dan daerah yang termasuk dalam *smart city*

akan mempengaruhi pemerintah daerah untuk lebih membuka informasi publik. Penelitian lain dilakukan oleh Mustapa dkk. (2019) menunjukkan bahwa tingkat kedetailan data, budaya organisasi, kebijakan, sumber daya, keterampilan, insentif, penggunaan dan partisipasi, serta tekanan eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Open Government Data* di Malaysia. Penelitian oleh Sayogo dkk. (2017) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu kerjasama antara pemerintah, akademik, swasta, dan masyarakat, sikap pemerintah dalam menerima kritik dan saran, pemimpin yang mendukung kreativitas, serta komitmen pemerintah terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal. Berdasarkan (Luthfia dkk., 2021) setidaknya terdapat empat hambatan penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hambatan tersebut yaitu kurangnya komitmen keterbukaan oleh pemerintah, birokrasi yang tidak fleksibel, dan budaya organisasi yang tidak terbiasa membuka informasi kepada publik. Masyarakat juga dinilai kurang sadar atas hak untuk mengakses informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik yang belum maksimal ini tentunya masih membutuhkan upaya dari pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas transparansi informasi yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (Moehardiono & Yuliati, 2021).

Komitmen pengungkapan informasi kepada publik juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas informasi dalam situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan Marthasari & Ismadiani, (2020) kinerja situs resmi pemerintah

daerah di Indonesia sebagian besar termasuk ke dalam kategori sedang. Akan tetapi pada kenyataannya, situs resmi pemerintah daerah sering kali tidak bisa diakses atau menunjukkan keamanan halaman situs tidak aman atau berbahaya, tampilan grafik yang tidak menarik serta tautan yang tidak *clickable*. Menurut Yuhertiana dkk., (2020) website kementerian keuangan serta auditor pemerintahan di beberapa negara tidak dapat diakses dalam mesin pencarian Google. Situs website pemerintah daerah juga sedikit yang menyajikan laporan keuangan daerahnya. Oleh karena hambatan tersebut, seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi publik (Shadrina & Hidajat, 2023).

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inisiatif *Open Government* menjadi penting untuk memastikan arah kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Peneliti tertarik meneliti faktor-faktor yang menjadi pendorong inisiatif *Open Government* dalam segi demografi, ekonomi, politik, dan profil kota pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Menurut data dari BPS pada tahun 2021 semua provinsi-provinsi di Pulau Jawa masuk ke dalam sepuluh besar provinsi penyumbang populasi terbanyak dan penghasil PDRB tertinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Karakteristik pemerintahan dengan populasi serta tingkat PDRB yang tinggi akan mendorong pemerintahannya untuk melakukan inisiatif akses dan pengungkapan informasi untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintah sektor publik (Alcaide Muñoz dkk., 2016). Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan menjadi contoh atau panutan bagi daerah lain di Indonesia sehingga komitmen kebijakan *Open Governmentnya* dapat ditiru oleh pemerintah daerah di luar provinsi di Pulau

Jawa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INISIATIF ADOPSI *OPEN GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA."**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah populasi penduduk berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
2. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
3. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
4. Apakah jumlah pajak yang dibayar masyarakat berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
5. Apakah fragmentasi politik berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?

6. Apakah stabilitas politik berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
7. Apakah *smart city* berpengaruh terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh jumlah populasi terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
4. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh jumlah pajak yang dibayar masyarakat terhadap terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

5. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh fragmentasi politik terhadap terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
6. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh stabilitas politik terhadap terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
7. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh penerapan *smart city* terhadap terhadap adopsi inisiatif *open government* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota dalam Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, pengetahuan baru, dan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Open Government* khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan terkait dengan implementasi *Open Government* di Indonesia sehingga mampu meningkatkan



transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah dan badan publik.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan baru khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi sektor publik serta dapat menjadi artikel rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.